

## BAB V

### FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN AIRLANGGA HARTARTO

Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mencerminkan dinamika kekuasaan dalam partai politik yang kompleks. Keputusan Airlangga mengundurkan diri sangat mengejutkan, dikarenakan Airlangga sudah sangat lama menjabat sebagai ketua umum partai Golkar sampai 2 periode dan telah banyak berkontribusi signifikan bagi Partai Golkar selama masa kepemimpinannya. Dari menyelamatkan partai dari krisis kepemimpinan hingga mempertahankan posisi Golkar sebagai kekuatan politik utama di Indonesia, Airlangga telah menunjukkan kepemimpinan yang stabil dan pragmatis. Meskipun terdapat kritik terhadap kepemimpinannya, jasa-jasa Airlangga dalam mengonsolidasikan partai, memastikan keterwakilan Golkar di pemerintahan, serta keberpihakan mendukung kebijakan nasional, hal ini membuktikan bahwa Airlangga memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dan relevansi Partai Golkar di panggung politik Indonesia. Dua hari sebelum pengunduran dirinya diumumkan ke publik, Airlangga tegas menyatakan bahwa Munas Golkar akan digelar pada Desember 2024. Pernyataan yang ia sampaikan ke wartawan pada Jum'at 9 Agustus 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan menjadi isyarat bahwa tidak akan ada perubahan kepemimpinan partai hingga akhir tahun 2024. Terlebih, sejak isu Munaslub Golkar berkembang pada 2023, Airlangga juga berulang kali menyatakan siap maju kembali dalam pencalonan ketua umum Golkar. Keputusan Airlangga mundur dari jabatan ketua umum pada akhirnya turut mencuatkan wacana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) lebih cepat dari yang direncanakan.

#### **5.1. Faktor-Faktor Keputusan Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar**

Keputusan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar pada 10 Agustus 2024 merupakan peristiwa yang mencerminkan kompleksitas dinamika politik internal dan eksternal Partai Golkar. Keputusan yang diambil oleh Airlangga tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan faksi internal, kritikan terhadap kepemimpinannya, hingga tantangan

yang muncul akibat perubahan lanskap politik nasional. Faktor-faktor yang peneliti bahas akan menghasilkan bukti yang terlihat bahwa transisi kekuasaan di tubuh Partai Golkar dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya. Dan melalui pendekatan teori transisi kekuasaan yang menekankan pada suatu pergeseran kepemimpinan dalam organisasi politik menambahkan bahwa transisi kekuasaan sering kali melibatkan proses yang tidak hanya mencerminkan pergantian figur kepemimpinan, tetapi juga upaya organisasi dalam menjaga stabilitas dan legitimasi di tengah perubahan kondisi politik (Huntington, 1991). Adapun alasan utama Airlangga Hartanto memutuskan untuk mengundurkan diri adalah

“untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Alasan tersebut Airlangga katakan kepada DPP Partai Golkar sebagai bentuk pemberian ruang bagi partai untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan figur kepemimpinan yang akan datang. Hal ini tentu akan menciptakan suasana yang lebih kondusif di dalam Partai Golkar, mengingat waktu saat itu menjelang pemilihan umum yang mana pasti akan terjadi benturan kepentingan dan faksi-faksi yang berbeda di internal Partai Golkar. Selain itu, Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa perannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan fokus lebih dalam menjalankan tugasnya di kabinet, khususnya mengawal program-program berkaitan dengan transisi pemerintahan. Semua alasan yang diungkapkan semata-mata seperti halnya bentuk formalitas yang dijawab berdasarkan menjaga wajah partai dimata publik. Hal ini dikarenakan Airlangga tidak mengungkapkan penyebab keputusan tersebut diambil secara detail dan tidak langsung mengatakan terkait adanya tekanan internal maupun eksternal Partai, yang mana tentunya dapat mengundang spekulasi dan reaksi mata publik. Namun, pihak perwakilan DPP Partai Golkar menjawab pertanyaan dalam wawancara yang mana dikutip juga dari beberapa berita yang beredar yang pernah dibaca, yakni sebagai berikut:

“Seperti yang kita ketahui bahwa Golkar memiliki struktur organisasi yang sangat solid di seluruh Indonesia, banyak pengurus daerah yang merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pusat. Sebagai ketua umum, Airlangga

dianggap kurang mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi para kader di daerah. Para pengurus daerah merasa bahwa Golkar yang dipimpin oleh Airlangga lebih terfokus pada kepentingan nasional dan kurang memberikan perhatian pada permasalahan lokal yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa pengurus daerah merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Airlangga terlalu terpusat pada dirinya dan tidak melibatkan partisipasi dari tingkat bawah. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan memicu munculnya ketegangan di antara kader-kader yang menginginkan perubahan dalam struktur kepemimpinan partai” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Pernyataan tersebut dapat dijadikan alasan bahwa salah satu penyebab keputusan Airlangga mengundurkan diri adalah adanya rasa ketidakberhasilan dalam dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar akibat munculnya permasalahan ketidakadilan dan ketegangan antara pengurus dan kader-kader partai Golkar di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Dalam acara Munas Partai Golkar yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, setiap permasalahan yang dihadapi baik itu perubahan arah kebijakan, pergantian pemimpin, ataupun perumusan langkah politik partai, selalu diselesaikan melalui forum tertinggi ini dan setiap dinamika internal pasti akan terjadi serta tidak dapat dipisahkan dari dalam forum tersebut termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai. Pada saat pengambilan keputusan tersebut, Ketua Umum Partai tentu harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan untuk mencapai mufakat keseluruhan anggota partai. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemegang kekuasaan harus membuat keputusan yang mempertimbangkan berbagai variabel, termasuk tujuan organisasi, kepentingan kelompok, serta ekspektasi dari para pemangku kepentingan (Jurnal media akademik, JMA 2024). Menurut teori ini, keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai arah, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks kepemimpinan Airlangga Hartarto, keputusan yang diambil olehnya seringkali mengundang respons yang beragam dari lingkup internal partai. Hal ini dibicarakan oleh pihak perwakilan DPP Partai Golkar, sebagai berikut:

“setiap keputusan besar yang diambil oleh Airlangga, terutama dalam Munas, sering kali menimbulkan reaksi dari berbagai faksi di internal partai. Golkar dikenal memiliki banyak faksi yang terbentuk dari sejarah panjangnya, mulai dari kelompok senior partai, loyalis mantan ketua umum, hingga generasi muda partai. Perbedaan kepentingan antara faksi-faksi ini sering kali memicu dinamika internal yang memengaruhi suasana Munas. Keputusan Airlangga Hartarto dalam Munas Partai Golkar sangat mungkin memicu dinamika internal, mengingat kompleksitas struktur partai dan keberagaman kepentingan di dalamnya” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Munculnya dinamika setiap kali Airlangga Hartarto mengambil keputusan besar dalam forum tertinggi (Munas Partai Golkar) wajar terjadi dalam partai besar, mengingat partai ini memiliki sejarah panjang dan jaringan yang luas di seluruh Indonesia. Disisi lain, dinamika ini juga menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang dinamis dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.

#### **5.1.1. Faktor Internal Partai Golkar**

Seerti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konteks pengunduran diri Airlangga Hartanto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar salah satunya karena faktor dinamika internal partai. Dinamika ini selalu terjadi setiap kali Airlangga Hartarto mengambil keputusan besar dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang seharusnya dapat dimaklumi hal tersebut terjadi. Selain dikarenakan mengingat partai golkar memiliki sejarah panjang dan jaringan yang luas di seluruh Indonesia tetapi juga setiap forum atau perkumpulan pasti ada perdebatan yang secara murni terjadi begitu saja karna organisasi partai akan tetap hidup berjaya apabila mampu bertahan menghadapi tantangan setiap zaman dan mampu memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi internal partai yang terjalin antar anggota atau pemimpin partai harus terjaga dengan baik dan solidaritas yang kuat. Komunikasi juga merupakan pondasi utama dalam partai yang mana dapat mengurangi tingkat kesalahpahaman internal maupun eksternal partai serta memperkuat jiwa persaudaraan anggota partai. Dalam hal ini, sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pihak perwakilan DPP Partai Golkar, sebagai berikut

“Tentu saja, komunikasi internal partai dan hubungan yang terjalin antara Airlangga Hartarto dengan para tokoh besar Partai Golkar memainkan peran yang sangat penting dalam setiap keputusan strategis yang diambil, termasuk dalam konteks keputusan di Musyawarah Nasional (Munas) Golkar” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Pernyataan tersebut membuktikan komunikasi internal partai menjadi hal yang sangat penting dan sensitif sehingga Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat seharusnya mampu mengelola hubungan dengan berbagai elemen internal, termasuk beberapa tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh besar dalam kemajuan partai golkar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Umum sebelumnya yang pernah menjadi pemimpin partai golkar, mempertahankan kondisi komunikasi internal maupun eksternal partai dengan baik dapat membantu memberikan pengaruh signifikan dalam keputusan besar seperti penentuan arah politik maupun kebijakan strategis yang mana tentunya apabila terjadi kesalahan dapat memicu perpecahan internal partai. Hubungan berbagai elemen internal partai akan berlangsung dengan baik bila dijembatani komunikasi dari Ketua Umum Partai yang mengayomi seluruh anggota dengan intens. Hal ini seperti yang dikatakan oleh pihak perwakilan DPP Partai Golkar, sebagai berikut:

“Airlangga Hartarto harus mampu mengelola hubungan dengan berbagai elemen internal, termasuk seperti Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki pengaruh besar dalam Golkar. Kader yang menduduki posisi penting di pemerintahan, legislatif, dan struktur partai. Golkar secara tradisional dikenal memiliki berbagai faksi yang terbentuk dari perbedaan kepentingan politik, latar belakang, dan generasi. Keputusan yang diambil oleh Airlangga hampir pasti melibatkan proses komunikasi yang intens dengan elemen-elemen ini” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Para dewan pembina partai golkar ikut serta menanggapi sekaligus menekankan bahwa sangatlah penting untuk menjaga stabilitas internal partai dalam konteks transisi pemerintahan yang sedang berlangsung, alasan yang digunakan oleh Airlangga saat mengumumkan pengunduran dirinya pada 10 Agustus 2024 merupakan hal yang tepat karna untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan tetap memastikan stabilitas internal

partai selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun pernyataan dari Aburizal Bakrie selaku salah satu Dewan Pembina Partai yang peneliti dapatkan dari wawancara pihak perwakilan DPP Partai Golkar, sebagai berikut:

“Dewan Pembina Partai Golkar memberikan tanggapan positif terhadap pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina, menyatakan bahwa mereka memahami keputusan tersebut dan menghormatinya. Sebagai Dewan Pembina dan pengurus partai akan segera mengadakan rapat untuk menentukan pelaksana tugas ketua umum dan merencanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih pengganti Airlangga” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Berdasarkan tanggapan tersebut membuktikan bahwa dewan Pembina maupun pengurus partai golkar memaklumi dan menghormati keputusan yang dipilih oleh Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan berbagai alasan yang diungkapkan dan tidak memberikan pernyataan yang dapat mencoreng atau menyinggung nama baik Partai Golkar. Keputusan yang diambil oleh Airlangga Hartarto dianggap sudah tepat karna dikala kesibukannya yang terpilih sebagai Menko Perekonomian, tetapi tetap memastikan stabilitas internal partai meskipun banyak keresahan anggota partai golkar di daerah, beliau tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebelum meninggalkan posisi jabatannya sebagai ketua umum.

### **5.1.2. Faktor Eksternal Partai Golkar**

Keputusan yang diambil oleh Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dapat disebabkan oleh pengaruh eksternal partai berupa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Eksternal yang dimaksud adalah tudingan publik terhadap Airlangga Hartarto yang mengaitkan dugaan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) beserta turunannya yang dilakukan periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan. Adapun tudingan lain yang melaporkan Airlangga ke Bareskrim Mabes Polri atas dasar kecurangan (permainan kotor) dengan para importir saat melepaskan 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya pada 18 Mei 2024. Namun, semua tudingan yang dilontarkan kepada Airlangga Hartarto sudah beberapa kali dibantah oleh pihak partai

bahwa pengunduran diri Airlangga tidak ada keterkaitannya dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pihak perwakilan DPP Partai Golkar, sebagai berikut:

“Ada bantahan dari Waketum Golkar yang menyatakan bahwa alasan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar bukan masalah hukum di Kejaksaan agung. Menurutnya, keputusan Airlangga mengundurkan diri sangat personal. Selain alasan personal, Airlangga memang ingin berfokus mengemban tugas sebagai Menko Perekonomian, terutama di masa transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran. Menko Perekonomian merupakan tanggung jawab besar, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti pasca pandemi, inflasi global, atau tekanan dari masyarakat terkait kebijakan publik” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Setelah beberapa tuduhan, adapun kritik tajam dari masyarakat ataupun kelompok tertentu yang dilontarkan guna mempengaruhi stabilitas politik partai untuk menjadi alasan memecat atau menurunkan Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi kepentingan partai yang jauh lebih besar. Beberapa kritik lainnya berasal dari suatu kelompok pengusaha maupun para pemangku kepentingan yang merasa sedang dirugikan dengan keberadaan Airlangga saat itu sebagai Ketua Umum yang mana dianggap sering membuat kebijakan yang bertentangan dengan urgensi nasional dan internasional. Artinya, kebijakan yang dibuat Airlangga sering mengkhawatirkan konstelasi politik baik dalam Partai Golkar maupun para pemangku kepentingan (pihak luar partai). Oleh sebab itu, tekanan eksternal terus datang hingga akhirnya tercapai pernyataan pengunduran diri Airlangga yang muncul dengan alasan menjaga stabilitas partai Golkar selama masa transisi pemerintahan, walau faktanya hal itu muncul karna tekanan eksternal demi memastikan kondisi partai tetap relevan dan solid dalam menghadapi perubahan politik yang akan datang sehingga menciptakan kebutuhan untuk mengatur ulang kepemimpinan partai. Berdasarkan teori kepemimpinan khususnya terkait legitimasi kepemimpinan (Surbakti, 2010). menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan dan dukungan baik dari internal organisasi maupun dari aktor eksternal untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Dalam kasus Airlangga Hartarto, kritik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar partai, menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinannya mengalami tantangan serius. Ketika

kebijakan yang ia buat dianggap bertentangan dengan urgensi nasional dan internasional, serta memicu kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan, maka tekanan untuk menurunkan Airlangga dari posisi Ketua Umum semakin menguat. Dan keputusan Airlangga untuk mundur dapat dilihat sebagai upaya strategis untuk merespons krisis legitimasi ini, dengan tujuan menjaga stabilitas internal partai selama masa transisi pemerintahan. Adapun pendapat dari pihak perwakilan partai golkar yang menyatakan bahwa:

“kemungkinan adanya tekanan dari pihak luar atau faksi dalam partai yang mendorong perubahan kepemimpinan untuk memperkuat posisi Golkar dalam pemerintahan baru. Pengunduran diri Airlangga dianggap berhasil dapat mengubah peta politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga pada strategi politik di tingkat nasional” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Kemudian berbagai respon dari kader muda maupun loyalis Airlangga pun ikut serta dalam menanggapi isu faktor eksternal yang mempengaruhi masa kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Salah satu respon umum loyalis yang dapat diamati merupakan loyalis yang memang sangat dekat hubungannya dengan Airlangga dan biasanya cukup tegas dalam mendukung kepemimpinan Airlangga khususnya ditengah isu kepentingan eksternal. Tanggapan loyalis tersebut disampaikan oleh pihak perwakilan DPP partai Golkar yakni, sebagai berikut:

“Mereka dapat mengeluarkan pernyataan resmi untuk membela Ketua Umum dan menegaskan bahwa isu-isu eksternal hanyalah bagian dari dinamika politik biasa. Para loyalis menggerakkan kader-kader muda atau organisasi sayap partai untuk menggalang dukungan melalui pernyataan politik, diskusi publik, atau media sosial, menekankan keberhasilan Airlangga, baik dalam memimpin partai maupun mengelola kebijakan ekonomi nasional. Mereka juga bisa memanfaatkan keberhasilan Airlangga, seperti pencapaiannya dalam membawa stabilitas ekonomi, sebagai cara untuk memperkuat posisinya dan meredam kritik” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Dalam hal ini, para loyalis cenderung mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi tekanan eksternal, mereka bisa saja mengkonsolidasikan dukungan di internal Partai Golkar, khususnya di antara kader muda dengan cara yang paling memungkinkan yaitu membuat pertemuan atau forum untuk meredakan potensi perpecahan. Dan apabila ada tekanan dari faksi internal yang berusaha menjatuhkan kepemimpinan Airlangga, para loyalis mungkin akan melawan balik dengan cara menguatkan narasi terkait stabilitas partai Golkar di bawah kepemimpinan. Dalam konteks tersebut, respons dari loyalis Airlangga Hartarto mencerminkan suatu strategi untuk mempertahankan legitimasi kepemimpinan Airlangga di tengah-tengah banyaknya tekanan dari faksi internal dan eksternal. Menurut teori konflik menekankan pentingnya proses mediasi dan konsolidasi dalam mengelola konflik semacam ini (Kompas.com, 2022). Konsolidasi yang dilakukan oleh loyalis, misalnya, melalui pertemuan kader muda atau organisasi sayap partai, merupakan langkah strategis untuk menciptakan kohesi internal dan meredakan potensi perpecahan.

Munculnya berbagai faksi pada internal partai dengan kepentingan yang berbeda merupakan tanda dinamika internal dalam organisasi yang dapat menciptakan ketegangan politik antar faksi tersebut. Dinamika politik semakin intens saat mendekati tahun pemilu 2024 kemarin, Airlangga tentu semakin banyak menghadapi tekanan politik baik dari mitra koalisi atau bahkan Presiden, yang dapat memengaruhi perannya baik di partai maupun pemerintahan. Tekanan politik nasional juga bisa datang dari kompetisi internal maupun eksternal terutama saat itu terkait pencalonan presiden atau wakil presiden. Pada awalnya, Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar disebut-sebut menjadi kandidat yang berpotensi sebagai salah satu calon. Namun, saat beberapa lama perkembangan masa pencalonan kandidat dari partai, peluang Airlangga mengecil dan ada kemungkinan muncul bahwa Airlangga didorong untuk lebih mengutamakan kepentingan partai dengan memberikan jalan bagi calon lain. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti evaluasi elektabilitas, dinamika dalam koalisi, dan perhitungan strategis partai untuk menjaga stabilitas dan relevansi politiknya. Dalam situasi seperti ini, tekanan untuk memberikan jalan kepada calon lain yang lebih diuntungkan secara politik menjadi langkah kompromi yang umum dilakukan dalam partai besar. Sebagai bagian dari kabinet, Airlangga juga berada di bawah pengaruh langsung Presiden, yang memiliki kepentingan dalam menjaga

stabilitas politik nasional, terutama di masa transisi pemerintahan. Jika Presiden atau pemerintah mendukung figur tertentu dalam pemilu, Airlangga mungkin menghadapi tekanan untuk menyelaraskan langkah politiknya dengan agenda nasional tersebut. Dalam konteks hubungan kekuasaan, posisi Airlangga menunjukkan kepemimpinan politik sering kali berada di bawah tekanan berbagai macam kepentingan yang saling bersaing. Selain itu, penurunan popularitas akibat skandal yang melibatkan Airlangga juga dapat memperlemah posisinya, baik di partai maupun di pemerintahan. Dalam legitimasi politik, penurunan persepsi publik terhadap seorang pemimpin dapat menciptakan tekanan eksternal yang memengaruhi keputusan politik di internal partai. Tekanan ini sering kali digunakan oleh faksi-faksi internal untuk mendorong perubahan kepemimpinan demi menjaga citra partai dan meningkatkan daya saing politiknya di mata masyarakat. Dengan demikian, keputusan Airlangga mengundurkan diri dapat dilihat sebagai hasil dari serangkaian tekanan yang saling berinteraksi, baik dari faksi internal partai, pemerintah, maupun masyarakat luas. Langkah ini mencerminkan strategi adaptif dalam merespons dinamika politik yang kompleks untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas organisasi di tengah tantangan politik yang semakin kompetitif.

## **5.2. Mekanisme Transisi Kekuasaan Partai Golkar**

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, mekanisme transisi kekuasaan partai Golkar terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yaitu forum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Munas Partai Golkar merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, termasuk transisi kepemimpinan Ketua Umum. Setiap kali diadakan Munas Golkar, susunan panitia Munas akan sesuai dengan SK Panitia Penyelenggara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diterbitkan pada saat beberapa minggu menuju acara Munas digelar. Susunan panitia Munas terbagi menjadi 2 bagian yakni Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC). Untuk penanggung jawab acara Munas Golkar biasanya Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat periode tersebut, namun jika berhalangan hadir atau sudah mengundurkan diri maka akan digantikan oleh Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam memastikan proses acara Munas berjalan lancar, Panitia Munas mempersiapkan beberapa hal diantaranya adalah:

“Panitia Munas biasanya mengambil beberapa langkah strategis yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, serta

mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal. Panitia Munas dan DPP Golkar menggelar rapat pleno untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Munas. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kader dan pengurus dapat hadir, serta memberikan waktu yang cukup untuk persiapan. Panitia mengumumkan mekanisme dan agenda Munas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umum” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Beberapa hal tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan acara munas baik mencakup pendaftaran calon, persyaratan administrasi, dan mekanisme pemungutan suara. Selain itu, panitia juga mengoordinasikan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengirimkan delegasi resmi yang mana setiap DPD memiliki hak suara yang juga penting untuk dipertimbangkan sehingga hal tersebut dilakukan memastikan mereka memahami proses pemilihan. Adapun tatacara pencalonan Ketua Umum Partai Golkar melalui proses pendaftaran yang dibuka untuk seluruh kader partai yang ingin mencalonkan diri dengan persyaratan seperti, setiap calon harus memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART, mempunyai pengalaman kepemimpinan di partai, dukungan minimal dari DPD, dan rekam jejak yang baik. Selanjutnya, setiap calon yang mendaftar wajib memenuhi persyaratan formal, termasuk dukungan tertulis dari DPD. Semua proses harus dilakukan secara transparan untuk menghindari kontroversi. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Panitia Munas hal ini menunjukkan penerapan konsensus dalam organisasi yang mana menekankan bahwa keberhasilan transisi kepemimpinan dalam sebuah organisasi politik bergantung pada kemampuan untuk menciptakan konsensus di antara para pemangku kepentingan utama. Dengan begitu, koordinasi dengan DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan kehadiran dan partisipasi mereka dalam Munas adalah upaya untuk menghindari konflik serta membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya, transparansi dalam proses pencalonan dan pemilihan Ketua Umum juga mencerminkan penerapan akuntabilitas yang menggarisbawahi bahwa proses yang terbuka dan dapat diaudit menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan para anggota partai. Hal ini menjadi penting bagi Partai Golkar, mengingat sejarah partai yang kerap diwarnai konflik internal selama masa transisi kepemimpinan. Dengan memastikan proses yang transparan dan sesuai dengan

aturan, partai dapat meminimalkan potensi kontroversi dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto, Dewan Pembina akan terlibat dalam proses penunjukan pelaksana tugas (Plt) dan calon ketua umum baru. Proses pemilihan ketua umum baru akan dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan saat itu berlangsung pada 20-21 Agustus 2024. Tanggapan pihak perwakilan DPP Partai Golkar terhadap hal tersebut adalah:

“Sudah ada beberapa nama pengganti Airlangga yang telah muncul dihadapan publik, termasuk Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Soesatyo. Oleh karena itu, Dewan Pembina tentu mempertimbangkan dukungan dari para kader serta dinamika internal partai dalam menentukan siapa yang paling cocok untuk memimpin Golkar ke depan. Selain itu, Dewan Pembina bertanggung jawab menjaga stabilitas internal partai selama masa proses transisi kepemimpinan dan Dewan Pembina harus mempertimbangkan konteks politik yang lebih luas dalam mengambil Keputusan.” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Fungsi Dewan Pembina Partai Golkar sangat penting pada proses pemilihan Ketua Umum yakni sebagai kunci penentu arah kepemimpinan partai setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto yang harus fokus pada stabilitas internal dan respons terhadap dinamika politik yang berkembang. Disisi lain, ada peran Dewan Pakar Partai Golkar yang tidak kalah penting fungsinya dalam proses pemilihan Ketua Umum yang baru, yakni memberikan dukungan kepada calon-calon ketua umum yang dianggap layak untuk memimpin partai seperti menguatkan calon yang diyakini Dewan Pakar memiliki kapasitas dan komitmen untuk memimpin Golkar ke depan. Berdasarkan struktur partai, dewan pakar bertugas sebagai berkontribusi dalam merumuskan visi dan misi partai yang akan diusung oleh calon ketua umum untuk memastikan bahwa kepemimpinan baru sejalan dengan tujuan dan aspirasi partai, dan juga mengawasi proses pemilihan, memastikan bahwa semua tahapan dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi, serta dapat memberikan masukan dan penilaian terhadap calon-calon yang maju dalam pemilihan. Pada acara Munas pasca Airlangga

mengundurkan diri, Dewan Pakar ikut berperan dalam pemilihan ketua umum partai yang baru dan dijelaskan oleh pihak perwakilan DPP Partai Golkar sebagai berikut:

“Dewan Pakar hadir untuk memberikan arahan strategis dan mendukung keputusan yang diambil oleh peserta Munas. Mereka bertugas menjaga agar proses pemilihan berjalan lancar serta aklamasi tercapai, memberikan dukungan kepada calon aklamasi (yang diyakini paling tepat), membantu menciptakan suasana kondusif bagi pemilihan ketua umum baru, dan juga menjaga keseimbangan antara berbagai faksi kepentingan yang ada di dalam Partai Golkar, agar pemilihan ketua umum tidak hanya menguntungkan satu pihak saja” (wawancara tanggal 22 november 2024).

Keterlibatan seluruh dewan pimpinan struktural tertinggi dalam mekanisme transisi kepemimpinan partai golkar pada acara Munas pasca pengunduran diri Airlangga menandakan bahwa masing-masing dewan pimpinan masih bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas beserta fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan tidak hanya mengawasi atau memonitor tetapi juga berperan langsung melalui proses aklamasi yang ditujukan untuk Bahlil Lahadalia sebagai pengganti Airlangga pada jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, pertanda lainnya muncul dengan hambatan dalam bentuk dinamika internal yang berpotensi konflik berkelanjutan antar faksi di dalam partai. Hal ini dikarenakan faksi-faksi dalam Partai Golkar akan mengambil sikap ketika pemerintahan baru resmi dilantik, yang mana apabila kepemimpinan Bahlil Lahadalia justru tidak membawa banyak keuntungan di masa pemerintahan Prabowo Subianto, maka ada kemungkinan gejolak internal partai akan semakin parah (Tribunnews, 2024). Berdasarkan ungkapan tersebut, harapan kepada Bahlil lebih besar untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kepercayaan kader partai setelah prestasi partai di Pileg 2024 kemarin. Ketika Pileg sudah selesai dan faktanya Bahlil mampu menjalankan tugas memimpin Partai dengan baik, karna apabila tidak berjalan sesuai target semestinya atau tidak mencetak performa yang optimal dalam pilkada tersebut maka sudah dipastikan gejolak internal akan semakin besar terjadi pada Partai golkar yang mana partai ini memiliki sejarah panjang dengan faksi-faksi yang kuat. Beberapa konflik yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam mekanisme transisi kepemimpinan menjadi suatu hambatan partai karna semakin tingginya ketidakpercayaan dan kecurigaan masyarakat terhadap partai serta semakin

kurangnya legitimasi pemimpin partai, diantaranya konflik antarfaksi, soliditas internal, dan gejolak Pilkada 2024. Solusi penyelesaian permasalahan partai politik di Indonesia harus mengikuti aturan UU Parpol yang sedang berlaku yakni melalui Mahkamah Partai, namun seringkali kewenangan Mahkamah Partai yang dipatahkan/dimentahkan oleh pihak internal partai sehingga menjadikan konflik permanen dan sulit dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, yang harus diperbaiki tentu dimulai dari sistem internal partai yang mana penanganan konflik dilakukan lebih bijak berdasarkan prinsip legalitas UU Parpol, memperbaiki sistem kaderisasi, dan juga meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partai dapat mempertahankan integritas dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan politik yang akan datang.

### **5.3. Politik Kekuasaan Dalam Transisi Kepemimpinan Partai Golkar**

Transisi kepemimpinan tentu berimplikasi jangka panjang terhadap stabilitas dan arah politik partai. Keputusan untuk menyetujui pernyataan pengunduran diri Airlangga Hartarto dan mengaklamasikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum dalam Munas diharapkan dapat membawa angin segar dalam kepemimpinan partai Golkar, namun ternyata juga tetap disertai dengan tantangan besar. Tekanan internal dari para pengurus partai Golkar terus menerus dihadapi oleh Airlangga di semasa kepemimpinannya, awalnya tidak mampu menggoyahkan keyakinan dan kepercayaan dirinya sebagai Ketua Umum saat itu, tetapi munculnya tekanan eksternal dari penguasa yang sangat besar dan bersekutu dengan orang dalam lingkaran penguasa di pemerintahan hingga membuat tekanan yang terus menerus ditujukan pada Airlangga dan semakin lama terlihat tidak ada yang mendukung Airlangga yang pada akhirnya menyerah juga untuk mengundurkan diri. Walaupun dahulu Airlangga sangat dekat dengan penguasa di barisan pemerintahan juga, namun memang benar kepentingan politik akan terus berkembang bagi setiap orang. Adapun pernyataan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan analis politik yang mengatakan bahwa:

“Iya memang dulu beliau sangat dekat dengan penguasa ya tapi kan penguasa itu punya agenda politik yang kebetulan ini beririsan dengan posisi nya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar, penguasa pada saat menghadapi pilpres punya agenda politik yang berbeda dengan Airlangga Hartarto tapi beririsan dengan posisinya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai Golkar. Penguasa menginginkan dukungan dari partai Golkar Airlangga juga

mungkin sudah coba melobby atau memberikan sinyal setidaknya tetapi sinyal itu tidak mendukungnya gitu” (wawancara tanggal 12 January 2025).

Berdasarkan pendapat tersebut, awalnya Airlangga sudah menyiapkan strategi untuk melanjutkan hasratnya untuk turut serut dalam riya-riya politik 2024 yakni mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden yang mana targetnya tersebut berusaha diwujudkan dalam bentuk mengambil inisiasi untuk membangun koalisi (koalisi Indonesia bersatu) yang saat itu tergabung dalam partai Golkar sebagai pelopor utamanya, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP. Semua ketua umum dari ketiga partai tersebut telah bersepakat untuk membangun koalisi Indonesia bersatu. Namun ternyata, keinginan dari Airlangga ini justru malah mengusik penguasa yang sebenarnya telah memiliki agenda politik yang berbeda dengan Airlangga seperti sudah menyiapkan figur siapa yang akan di dukung dalam pilpres 2024. Setelah sekian banyak drama yang muncul, akhirnya Airlangga memutuskan untuk menurunkan ego dengan menghentikan hasratnya sebagai capres atau cawapres dan lanjut mendukung Prabowo-Gibran. Tidak hanya itu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh analis politik bahwa lingkaran penguasa ini sudah berbeda jalan pemikiran dengan Airlangga Hartarto dan kondisi internal Partai Golkar pun sebenarnya sudah bergejolak berkali-kali karena beberapa kelompok fraksi sudah mulai mempersoalkan atas menggugat kepemimpinan Airlangga Hartarto itu jauh sebelum tahapan pilpres, ditambah lagi timbul ketidakpercayaan terhadap Airlangga dari satu kelompok tertentu serta beberapa pihak di internal partai Golkar sehingga semakin kencang turbulensi yang tercipta untuk mendorong Airlangga mundur dari jabatannya. Adapun hal pribadi terjadi saat itu ialah terungkapnya kasus hukum Airlangga dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau bahan baku minyak goreng. Selanjutnya hal yang terakhir mengejutkan ternyata sudah ada seseorang yang menginginkan sekaligus siap berada di posisi ketua umum partai Golkar untuk menggantikan Airlangga. Semua hal tersebut terjadi secara berturut-turut dan bersamaan seperti sesuatu yang telah dirancang diluar ekspektasi publik ataupun diri Airlangga sendiri. Keputusan akhir Airlangga untuk mengundurkan diri merupakan hal yang bertubi-tubi beliau pertahankan tetapi takdir dalam politik berkata lain yang mana beliau pun harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena dorongan dari berbagai pihak. Menurut pengamat politik yakni

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute mengatakan bahwa:

“Menurut saya, Airlangga ini menghadapi menerima tragedi yang tragis sebagai ketua umum partai Golkar selama 2x yang tragis nya satu hasrat yang kandas untuk maju sebagai capres dan gagal mempertahankan posisinya sebagai ketua umum dia harus merelakan itu dan tentu saja mundur nya Airlangga Hartarto ya ga mungkin lah tanpa sebab karena ini ternyata ada yang menginginkan posisi ketua umum nah tapi pertanyaannya kenapa Airlangga Hartarto itu mau mengundurkan diri nah tentu jika tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya ga mungkin dia mengundurkan diri gamungkin impossible itu”. (wawancara tanggal 12 January 2025).

Dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa kegagalan yang dialami oleh Airlangga Hartarto tersebut menjadi dua sisi, yakni yang menyelamatkan dirinya atau menjatuhkan dirinya. Hal yang menyelamatkan dirinya itu adalah posisi beliau saat ini tidak ikut serta riya-riya politik yang mana artinya tidak mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres, menuruti tuntutan berbagai fraksi dalam internal termasuk lingkaran penguasa untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, dan berhasil tetap masuk dalam barisan pemerintahan yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Merah Putih. Ketiga hal diatas sangat membantu dan menyelamatkan posisi Airlangga yang mungkin saja saat-saat itu dapat menjadi mimpi buruk yang dialami beliau jika tidak mengambil keputusan yang sangat beruntung tersebut, seperti saat ini sudah tidak terdengar lagi isu atau kasus yang berkaitan dengan dirinya yang mana sudah tertutupi dengan kasus-kasus politik yang baru. Selanjutnya sisi lain yaitu hal yang menjatuhkan adalah pada saat beliau sedang gencar mewujudkan keinginannya sebagai capres ataupun cawapres dengan membangun koalisi besar, beliau terjebak dengan dugaan kasus hukum yang mengangkat nama dirinya sebagai terduga kasus korupsi, selain itu juga ada beberapa kasus lain yang mungkin setumpuk kasus akan dibongkar yang terus menekan Airlangga agar segera mundur dari Ketua Umum Partai Golkar artinya hal ini akan memastikan dalam waktu dekat Airlangga dihadapi dengan kenyataan untuk masuk dalam jeruji besi dengan segala pertimbangan kasus yang telah beliau perbuat.

Berdasarkan analisa tersebut, peneliti mengaitkan dengan teori kekuasaan yang menjelaskan tentang aktor politik yang berusaha mempertahankan atau menyesuaikan posisinya dalam lanskap politik yang dinamis. Dalam konteks Airlangga Hartarto, keputusannya untuk mundur dari Ketua Umum Partai Golkar dapat dijelaskan dengan survival politik, dimana seorang pemimpin mengambil langkah strategis untuk tetap bertahan dalam kekuasaan atau menghindari ancaman yang dapat menghancurkan karier politiknya. Selain itu, seorang pemimpin harus pragmatis, fleksibel, dan cermat dalam membaca situasi untuk mempertahankan posisinya. Dalam kasus Airlangga, keputusan mundur dari Golkar tetapi tetap mempertahankan jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan strategi politik yang cermat untuk menghindari tekanan internal dan eksternal. Adapun persaingan antar-elite dan faksi dalam partai politik dapat memengaruhi keputusan seorang pemimpin. Tekanan dari berbagai fraksi di internal Golkar dan dugaan kasus hukum yang menyeret namanya menunjukkan adanya dinamika konflik yang memaksanya mengambil keputusan untuk mundur.

Partai Golkar yang dikenal sebagai partai besar sejak pertama kali berdiri tentu bukan tidak mungkin terjadi deal-deal-an politik atau semacam kesepakatan antar beberapa pihak khususnya dengan penguasa untuk meraih keuntungan dari tujuan yang sama. Dengan posisi Airlangga saat ini yang melanjutkan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian tentu salah satu deal-deal-an politik yang dibuat pilihan paling realistis untuk Airlangga dan mungkin saja paling terbaik dari yang terburuk. Seperti halnya yang dikatakan oleh seorang Analis Politik sebagai berikut:

“Posisi menko perekonomian ya mungkin itu yang terjadi di deal2 politik dan menurut saya gini ini yang dialami oleh Airlangga Hartarto hingga menggambarkan wajah rezim pemerintahan yang lebih parah dari orde baru, orde baru masih ada halus2nya tidak terduga, lah ini terduga membelah partai politik dan Golkar ini kesekian kalinya seperti yang sudah saya ungkap di awal tadi tetapi tidak hanya Golkar ada PPP, jadi PPP juga di acak acak PKB juga muncul kongres luar biasa dikit2 muncul lagi kasus Muhaemin Iskandar kasus curian mungkin tidak hanya kasus curian tapi ada kasus kasus lain juga mungkin ya untuk melakukan nya tekanan pada partai partai tersebut. Nah tergantung pada deal politik nya jika deal politik nya di sepakati oke ga lanjutlah kasusnya atau ada faktor lain. Ditengah Golkar juga sudah terbelah tidak terlalu solid

sehingga dia harus merelakan diri dengan terpaksa harus mengundurkan diri” (wawancara tanggal 12 January 2025).

Berdasarkan pendapat tersebut, kesepakatan politik yang terjadi pada Partai Golkar melibatkan para penguasa dan beberapa fraksi internal partai, termasuk Airlangga Hartarto didalamnya hingga akhirnya jelas terlihat terpecah belah tubuh partai Golkar. Adapun kemungkinan keikutsertaan Bahlil Lahadalia dalam proses kesepakatan mundurnya Airlangga dari Ketua Umum, dimana Bahlil sudah lama menginginkan posisi Ketua Umum Partai Golkar sedari dulu dan hubungannya yang dekat dengan lingkaran penguasa tentu mempermudah Bahlil Lahadalia memperoleh kekuasaan seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara sederhana bahwa sangat mungkin kalau kemunduran diri Airlangga ini ada hubungannya dengan Bahlil pula. Ada semacam konspirasi yang menurut analisis politik cukup masuk akal dan mungkin saja benar dilakukan melalui cara ini, yang mana beliau katakan sebagai berikut:

“Oh ini loh aktor dibelakang layar yang berada di dalam lingkaran penguasa publik tau lah bahwa Bahlil itu orang kepercayaan presiden Jokowi orang yang termasuk dekat apalagi posisinya sangat strategis di kementerian menjamin prestasi itukan sebagai strategi kemudian dikasih posisi lebih strategis lagi menteri jadi ada itu jawaban dari pertanyaan publik tadi ada apa si sebenarnya itu, kemudian terpilihnya si Bahlil dalam munaslub itu jawaban dari pertanyaan besar kenapa Airlangga Hartarto mundur dll” (wawancara tanggal 12 January 2025).

Berdasarkan pendapat tersebut, perlu dicatat bahwa kesepakatan yang terjadi antara Airlangga dengan para penguasa dan fraksi-fraksi internal, termasuk keterlibatan Bahlil Lahadalia, menggambarkan adanya kekuatan eksternal yang mempengaruhi proses internal partai. Fakta bahwa Bahlil memiliki kedekatan dengan lingkaran penguasa dan posisinya yang strategis di kabinet memberikan gambaran bahwa faktor kekuasaan eksternal dapat memengaruhi struktur partai politik dalam sistem demokrasi. Ketika seorang figur seperti Bahlil Lahadalia memperoleh posisi penting meskipun secara formal belum memiliki rekam jejak kuat dalam struktur Golkar, hal ini

menunjukkan adanya politik patronase yang seringkali berperan dalam merubah komposisi kekuasaan dalam partai.

Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Bapak Karyono Wibowo, keterlibatan aktor di balik layar yang memiliki kedekatan dengan presiden dan penguasa publik bisa memberikan penjelasan atas mengapa Bahlil memiliki akses ke posisi-posisi strategis di dalam Golkar. Seiring dengan berkembangnya pengaruh dan kedekatannya dengan pusat kekuasaan, Bahlil yang bukan figur lama di Golkar ternyata mampu meraih posisi yang seharusnya menjadi milik mereka yang lebih senior atau berpengalaman dalam partai tersebut. Di sini, faktor kekuatan luar struktur partai menjadi sangat relevan untuk memahami fenomena ini. Secara teoritis, hal ini dapat dilihat melalui lensa teori kekuasaan yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada struktur formal, tetapi juga pada jaringan hubungan sosial yang ada di luar struktur formal tersebut. Dalam hal ini, kedekatan Bahlil dengan penguasa publik memperlihatkan bahwa dia memiliki kekuatan sosial dan politik yang tidak bisa diabaikan oleh struktur internal Golkar. Dengan kata lain, meskipun secara formal Bahlil mungkin belum memiliki kapasitas atau rekam jejak yang cukup di Golkar, kekuatan yang ia miliki baik itu finansial, relasional, maupun posisinya yang dekat dengan penguasa memberikan peluang baginya untuk memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam partai.

Selain itu, pertanyaan mengenai kapasitas dan kemampuan Bahlil yang dipertanyakan oleh sebagian pihak dalam Golkar mencerminkan adanya ketegangan internal yang mungkin muncul akibat dominasi kekuatan eksternal dalam politik partai. Seperti yang dikatakan oleh analis politik, sebagai berikut: “Bahlil ini pemain memang dia aktivis punya nyali, punya uang, punya posisi, punya kedekatan meskipun bagi sebagian pihak di Golkar maupun diluar Golkar dipertanyakan soal kemampuan nya kapasitasnya juga dan status nya dia juga gitu padahal kan emang dia bukan siapa siapa juga di Golkar nah kenapa dia bisa naik pasti ada kekuatan besar diluar struktur Golkar tadi yang memengaruhi itu tadi gitu” (wawancara tanggal 12 January 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik Indonesia, terutama dalam partai besar seperti Golkar, kompleksitas hubungan antara individu, kekuasaan, dan pengaruh eksternal sering kali mempengaruhi hasil-hasil politik yang tampaknya tidak selalu berdasarkan pada meritokrasi atau kualifikasi formal.

Dengan melihat seluruh dinamika ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pergeseran posisi dalam kepemimpinan Golkar, yang melibatkan mundurnya Airlangga Hartarto dan kemunculan Bahlil Lahadalia, bukan sekadar hasil dari proses internal partai, tetapi juga merupakan refleksi dari interaksi kekuatan politik yang lebih luas dan pengaruh pihak-pihak luar yang memiliki agenda strategis untuk mempengaruhi arah kebijakan partai dan pemerintahan.

